

TESIS

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEPATUHAN
PENGUSAHA DALAM PELAKSANAAN UPAH MINIMUM
BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN**



Oleh

MUHAMMAD NASRI

NIM. 2320215310168

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2025

TESIS

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEPATUHAN
PENGUSAHA DALAM PELAKSANAAN UPAH MINIMUM
BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN**



Oleh

MUHAMMAD NASRI

NIM. 2320215310168

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2025**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEPATUHAN
PENGUSAHA DALAM PELAKSANAAN UPAH MINIMUM
BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN**

TESIS

**Untuk memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh

MUHAMMAD NASRI

NIM. 2320215310168

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2025**

**Judu Tesis : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
KEPATUHAN PENGUSAHA DALAM PELAKSANAAN
UPAH MINIMUM BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN**

**Nama : Muhammad Nasri
NIM : 2320215310168**

**Disetujui,
Pembimbing**



**Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 19820610 200501 1 002**

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001**

Tesis ini
Telah diperiksa dan disetujui
pada tanggal....

Pembimbing



Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 19820610 200501 1 002

Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum



Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Adnan Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal.....

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Saprudin, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Nasri
NIM : 2320215310168
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 30 Juni 2025

Yang membuat pernyataan

Muhammad Nasri

NIM. 2320215310168

NASRI, MUHAMMAD. 2025. PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEPATUHAN PENGUSAHA DALAM PELAKSANAAN UPAH MINIMUM BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Saprudin, S.H., LL.M., 121 halaman.

RINGKASAN

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia masih menyimpan persoalan mendasar mengenai perlindungan hak-hak pekerja, terutama dalam aspek pengupahan. Salah satu permasalahan yang paling krusial dan berulang adalah pelanggaran terhadap ketentuan upah minimum oleh pengusaha, baik di sektor formal maupun informal. Meskipun secara normatif negara telah menetapkan standar minimum pengupahan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diperbarui oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan peraturan turunannya, implementasi dari kebijakan tersebut belum menunjukkan efektivitas yang optimal. Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan struktural dalam hubungan industrial, sekaligus memperlihatkan lemahnya fungsi kontrol dan penegakan hukum oleh negara. Ketika mekanisme administratif dianggap tidak cukup, pendekatan pidana seharusnya hadir sebagai upaya korektif sekaligus represif terhadap pelanggaran hak normatif pekerja. Namun demikian, penerapan sanksi pidana dalam pelanggaran upah minimum masih jarang dilakukan dan kerap tidak berdampak signifikan terhadap kepatuhan pengusaha. Oleh karena itu, penelitian ini berangkat dari urgensi untuk menelaah sejauh mana hukum pidana dapat berfungsi secara efektif dan adil dalam menjamin hak pekerja atas upah minimum, tanpa mengorbankan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif posisi dan fungsi upah minimum sebagai instrumen perlindungan hak dasar pekerja berdasarkan prinsip keadilan dalam sistem hukum ketenagakerjaan. Tujuan lainnya adalah untuk mengkaji model penegakan hukum pidana yang ideal terhadap pelanggaran upah minimum, yang mampu menyeimbangkan antara keadilan substantif bagi pekerja dan kepastian hukum bagi pengusaha. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritik terhadap pengembangan ilmu hukum pidana dan hukum ketenagakerjaan, serta secara praktis menjadi masukan bagi pembuat kebijakan, penegak hukum, dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan dan strategi penegakan hukum yang lebih adil dan efektif. Di samping itu, hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan dorongan bagi pembentukan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang lebih responsif terhadap pelanggaran upah minimum di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan

kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan pelaksana, serta bahan hukum sekunder berupa doktrin, buku, dan jurnal hukum yang relevan. Penelitian ini juga menganalisis beberapa putusan pengadilan dan laporan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan untuk memberikan gambaran empiris yang dapat mendukung argumentasi hukum secara normatif. Seluruh data dianalisis dengan menggunakan teknik penalaran hukum deduktif untuk menarik kesimpulan berdasarkan norma-norma yang berlaku serta prinsip-prinsip keadilan dalam hukum pidana dan ketenagakerjaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum merupakan instrumen yuridis yang sangat penting dalam menjamin keadilan distributif dan kesejahteraan minimum bagi pekerja. Akan tetapi, efektivitasnya sangat ditentukan oleh adanya penegakan hukum yang konsisten dan proporsional. Penegakan hukum pidana dalam kasus pelanggaran upah minimum terbukti masih minim dan tidak memberikan efek jera yang cukup bagi pelaku usaha. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain tumpang tindih kewenangan antar lembaga, lemahnya koordinasi antar penegak hukum dan pengawas ketenagakerjaan, serta ketiadaan sistem terpadu dalam pelaporan dan penindakan. Oleh karena itu, diperlukan model penegakan hukum pidana yang ideal yang berbasis pada keadilan substantif, yaitu tidak hanya menindak pelanggaran tetapi juga memulihkan hak-hak pekerja, dengan tetap menjaga kepastian hukum dan perlakuan adil bagi pengusaha. Sinergi antara lembaga penegak hukum dan kelembagaan ketenagakerjaan menjadi syarat mutlak dalam mewujudkan sistem hukum ketenagakerjaan yang berfungsi secara efektif dalam menjaga keseimbangan antara keadilan dan kepastian.

NASRI, MUHAMMAD. 2025. PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEPATUHAN PENGUSAHA DALAM PELAKSANAAN UPAH MINIMUM BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Saprudin, S.H., LL.M., 121 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci: Hukum Pidana, Upah Minimum, Prinsip Keadilan

Penelitian ini berjudul Penegakan Hukum Pidana terhadap Kepatuhan Pengusaha dalam Pelaksanaan Upah Minimum Berdasarkan Prinsip Keadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis urgensi upah minimum bagi pekerja serta merumuskan model penegakan hukum pidana yang ideal dalam menjamin kepatuhan pengusaha terhadap ketentuan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum pidana ketenagakerjaan dan manfaat praktis bagi penegak hukum serta perumus kebijakan ketenagakerjaan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa upah minimum memiliki posisi strategis sebagai instrumen hukum yang menjamin perlindungan hak dasar pekerja. Dalam perspektif keadilan, upah minimum menjadi perwujudan prinsip keadilan distributif yang menyeimbangkan posisi antara pekerja dan pengusaha. Penetapan upah minimum merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memastikan bahwa setiap pekerja menerima upah yang layak untuk hidup manusiawi. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap ketentuan ini bukan hanya pelanggaran administratif, melainkan bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan sosial.

Penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran upah minimum perlu dilakukan secara proporsional, integratif, dan menjunjung tinggi keadilan substantif. Model penegakan hukum yang ideal adalah yang mampu memberikan efek jera bagi pengusaha yang melanggar, memulihkan hak pekerja, dan sekaligus menjamin kepastian hukum dalam proses penegakannya. Dengan sinergi antar lembaga penegak hukum dan lembaga ketenagakerjaan, serta dukungan regulasi yang tegas dan tidak multitafsir, maka hukum pidana dapat berfungsi sebagai alat perlindungan yang efektif dalam hubungan industrial di Indonesia.

NASRI, MUHAMMAD. 2025. CRIMINAL POLICY IN THE SETTLEMENT OF INDUSTRIAL RELATIONS DISPUTES IN INDONESIA. Master of Laws Program, Law, Lambung Mangkurat University. Supervisor: Dr. Saprudin, S.H., LL.M., 121 pages.

ABSTRACT

Keywords: Criminal Law, Minimum Wage, Principle of Justice

This thesis is entitled Criminal Law Enforcement on Employer Compliance in the Implementation of Minimum Wages Based on the Principle of Justice. The primary objective of this research is to analyze the urgency of minimum wage as a fundamental right of workers and to formulate an ideal model of criminal law enforcement to ensure employer compliance with minimum wage regulations. This study employs a normative juridical method by applying statutory, conceptual, and case approaches. The research is expected to provide theoretical contributions to the development of criminal labor law and offer practical insights for law enforcement officials and labor policy makers in Indonesia.

The findings reveal that minimum wage regulations serve as a critical legal instrument for protecting the basic rights of workers. From the perspective of justice, the minimum wage embodies the principle of distributive justice by ensuring fair compensation and correcting structural imbalances in industrial relations. The obligation to pay a minimum wage reflects the State's responsibility to guarantee a decent standard of living for workers. Therefore, violations of minimum wage provisions should not be viewed merely as administrative infractions but as infringements of constitutional and social justice principles.

An ideal model of criminal law enforcement in the context of minimum wage violations must be implemented proportionally, collaboratively, and in line with the concept of substantive justice. Enforcement must not only serve as a deterrent to non-compliant employers but also as a mechanism to restore the rights of affected workers and uphold legal certainty. Through effective synergy among law enforcement institutions and labor authorities, supported by clear, firm, and consistent regulations, criminal law can function as an effective instrument of protection and justice within Indonesia's industrial relations framework.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat, kasih sayang, dan anugerah-Nya, penulis diberikan kesehatan, kekuatan, serta ketekunan sehingga dapat menyelesaikan tesis ini sebagai bagian dari proses akademik pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penyusunan tesis ini merupakan hasil dari proses panjang pembelajaran, refleksi ilmiah, serta perjuangan intelektual yang penuh tantangan, baik secara akademik maupun personal.

Tesis yang berjudul Penegakan Hukum Pidana terhadap Kepatuhan Pengusaha dalam Pelaksanaan Upah Minimum Berdasarkan Prinsip Keadilan, tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bimbingan, bantuan, dan doa dari banyak pihak yang dengan tulus memberikan dukungan dalam berbagai bentuk. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan penting dalam proses penyusunan tesis ini.

1. Yang Terhormat dan Sangat Terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan dukungan kelembagaan, fasilitas akademik, serta suasana belajar yang kondusif dalam menunjang kelancaran studi penulis.
2. Yang Terhormat dan Terpelajar Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan arahan dan kebijakan akademik yang memudahkan penulis dalam menempuh proses studi dan penyusunan tesis.
3. Yang Terhormat dan Terpelajar Bapak Dr. Saprudin, S.H. LL.M., selaku Pembimbing Utama, yang telah dengan sabar, teliti, dan penuh perhatian membimbing penulis dalam proses penyusunan tesis ini, mulai dari tahap awal hingga selesai. Nasihat dan kritik beliau sangat berharga dalam mempertajam argumentasi hukum dalam tesis ini.

4. Para Dosen Pengampu pada Program Magister Hukum, yang telah mentransfer ilmu, membentuk pola pikir kritis, serta memberikan inspirasi dalam setiap diskusi dan perkuliahan yang memperkaya wawasan penulis.
5. Seluruh tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas bantuan administratif yang profesional dan ramah selama proses studi berlangsung.
6. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Hukum, atas kebersamaan, diskusi, kerja sama, dan dorongan semangat yang sangat berarti dalam membentuk atmosfer belajar yang positif dan dinamis.
7. Pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun telah memberikan kontribusi dalam bentuk apa pun selama proses penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini ke depan. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat akademik dan praktis bagi pengembangan hukum ketenagakerjaan dan penegakan hukum pidana yang berkeadilan di Indonesia.

Banjarmasin, Juni 2025

Penulis,

Muhammad Nasri

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	v
HALAMAN PERNYATAAN..	vi
RINGKASAN	vii
ABSTRAK	ix
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian	25
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	29
BAB II URGENSI UPAH MINIMUM BAGI PEKERJA BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN.....	31
A. Upah Minimum sebagai Instrumen Perlindungan Hak Dasar Pekerja.....	31
B. Prinsip Keadilan dalam Penetapan dan Pelaksanaan Upah Minimum.....	46
C. Urgensi Penegakan Hukum atas Pelanggaran Upah Minimum Berdasarkan Keadilan Substantif.....	61
BAB III PENEGAKAN HUKUM PIDANA YANG IDEAL AGAR DAPAT MEWUJUDKAN KEADILAN BAGI PEKERJA DAN TETAP MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM BAGI PENGUSAHA.....	77

A. Penegakan Hukum Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Substantif bagi Pekerja.....	77
B. Kepastian Hukum bagi Pengusaha Melalui Regulasi yang Tegas, Jelas, dan Konsisten.....	93
C. Sinergi Lembaga Penegak Hukum dan Kelembagaan Ketenagakerjaan untuk Mencapai Tujuan Keadilan dan Kepastian.....	110
BAB IV PENUTUP	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	

